



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Gedung B Lt 1 Jalan Soemantri Brodjonegoro 1 Bandar Lampung 35145 Telp 0721-708881

Nomor : 1593 /UN26/6/DT/2013  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Bandar Lampung, 29 April 2013

Yth. Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si  
Dosen Agrobisnis Fakultas Pertanian

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/ Ibu agar mahasiswa FISIP Universitas Lampung;

Nama : Aisyah Irma Hindarti  
NPM : 0916041023  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : 8

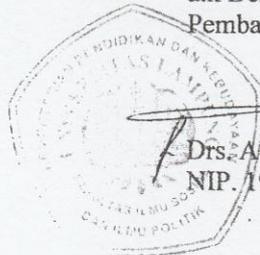
Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dari Fakultas Pertanian, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**“Kontroversi Kebijakan Impor Beras Di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”,**

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan ucapan terima kasih.

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I



*[Signature]*  
Drs. A. Efendi, M.M.  
NIP. 19590906 198803 1 011

## Tabel Triangulasi

### Kontroversi Kebijakan Impor Beras Di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

No.	Daftar Pertanyaan	Informan	Deskripsi Wawancara	Kategori Inti
1.	Bagaimana implementasi kebijakan impor beras di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ?	Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si (Dosen Agrobisnis Fakultas Pertanian)	Di era Pemerintahan Susilo Bambang sebagaimana pemerintahan sebelumnya, kita ini berusaha untuk mencapai swasembada beras dalam lingkup regional maupun secara internasional, tetapi karena jumlah konsumsi beras semakin tahun semakin naik jadi pertumbuhan konsumsi beras itu lebih besar dari pada pertumbuhan produksi. Akhirnya, konsumsi kurang mau tidak mau harus mengimpor dari luar, terutama dari negara-negara di ASEAN terutama Thailand dan Vietnam. Idealnya swasembada tapi kenyataannya tidak bisa menekan laju konsumsi. Di program diversifikasi pangan yang mengandalkan diversifikasi pangan bukan hanya saja beras yang dijadikan konsumsi ini tidak berjalan. Jadi akhirnya, tidak ada pilihan lain kecuali mengimpor.	Jumlah konsumsi beras yang tidak diikuti dengan pertumbuhan produksi yang mengakibatkan Indonesia mengimpor dari Thailand dan Vietnam sebagai pilihan, sehingga swasembada beras tidak dapat dicapai.
2.	Apakah hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ?		Kalau tujuan ini bagus, kadang-kadang kita tatanan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan. Setau saya, kondisi untuk mengimpor untuk mencukupi kebutuhan yang darurat saja, tapi setelah setelah itu sudah cukup tapi kenyataannya beras yang di Thailand sama Vietnam itu lebih murah, jadinya lebih murah daripada	Awalnya impor ditujukan hanya untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat darurat seperti bencana alam ataupun gagal panen, namun pada kenyataannya beras yang di produksi oleh Thailand dan Vietnam lebih murah dibandingkan beras yang di produksi dalam negeri. Hal ini

			<p>yang di produksi dari dalam negeri jadi pada pelaksanaan akhirnya jumlah yang di impor melebihi sehingga daya saing produksi dari dalam negeri ini jadi lebih rendah.</p>	<p>menjadikan konsumen beras lebih memilih beras yang lebih murah. Ini mengakibatkan daya saing produksi beras dalam negeri menjadi rendah.</p>
3.	<p>Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?</p>		<p>Kendala-kendalanya banyak diteknisnya. Tindakan kebijakan tinggal pemerintah tidak perlu persetujuan dari DPR karena pengadaan yang melakukan adalah BULOG bukan Kementerian Pertanian harus masuk di dalam APBN yang melakukan BULOG. Seberapa besar sebetulnya jumlah yang harus di impor yang datanya belum tepat secara jelas berapa impor karena nantinya akan menjadi dinamika dalam masalah beras itu besar sekali. Di Jawa sebagai penghasil beras tetapi di luar Jawa juga. Sumber daya untuk beraskan lebih besar punya keunggulan komperatif, jadi di luar Jawa pendataan jumlah seberapa besar itu yang masih belum valid. Hal inikan kalau kebijakannya bagus namun implikasinya yang banyak mengalami kendala-kendala yaitu waktu (<i>time</i>) untuk mengimpor, serta pendistribusiannya yang kadang-kadang tidak tepat penempatannya.</p>	<p>Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut lebih banyak di teknis, yaitu waktu yang tepat untuk mengimpor dan pendistribusian yang tidak tepat penempatannya, karena impor perlu proses dan prosedur-prosedur yang harus diikuti. Dapat dilihat bahwa tidak seluruh provinsi di Indonesia sebagai penghasil beras, jadi produksi beras yang dihasilkan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam hal ini beras untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Maka dari itu, untuk memenuhi itu semua beras harus di impor dari negara yang memang kelebihan produksinya (<i>surplus</i>) demi mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.</p>
4.	<p>Apakah kebijakan impor beras tersebut sesuai dengan kebutuhan pangan di Indonesia saat ini ?</p>		<p>Awalnya impor untuk mengatasi keadaan darurat atau mencukupi kekurangan. Maksud darurat ini seperti bencana alam atau perubahan iklim. Cuaca yang tidak mendukung keberhasilan sektor pertanian pangan, seperti yang terjadi saat ini.pergeseran musim hujan dan musim</p>	<p>Jika impor beras dimaksudkan hanya untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau gagal panen serta untuk mencukupi kekurangan pasokan beras dalam negeri, maka kebijakan impor beras bisa dirasa sesuai jika pasokan beras dari Vietnam</p>

			<p>kemarau menyebabkan petani kesulitan dalam menetapkan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam, benih beserta pupuk yang digunakan, sehingga penyediaan benih dan pupuk yang semula terjadwal permintaannya menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kelangkaan karena keterlambatan pasokan benih dan pupuk. Pada akhirnya hasil produksi pangan pada waktu itu menurun. Maka dari itu, impor khususnya beras dilakukan untuk mengatasi mencukupi kekurangan beras dalam negeri, sehingga kebijakan impor beras dirasa sesuai jika tidak dalam jumlah besar (melebihi) sesuai dengan kebutuhan dan hanya untuk mengatasi keadaan darurat saja.</p> <p><i>Supplier</i> beras dalam negeri yang jumlahnya berkurang akan tetapi peminat beras meningkat, jadi kurang pengimbangan harga. Dampak luas pada beras berdampak juga pada ekonomi politik.</p> <p>Pihak yang dirugikan dalam hal ini yaitu produsen-produsen dalam negeri. Mengimpor melebihi dari kebutuhan dan harga beras dari Vietnam yang ditawarkan murah ini menjadi daya tarik para pengimpor untuk memilih beras produksi dari Vietnam, sehingga produsen-produsen beras dalam negeri harus bisa bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah.</p>	<p>tidak melebihi pasokan beras dalam negeri. Penduduk Indonesia yang berjumlah jutaan tetapi beras yang dapat dihasilkan dalam negeri tidak dapat menutupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia sendiri yang sehari-hari mengkonsumsi beras dalam jumlah yang tidak sedikit.</p> <p>Pemasukan beras dari dalam negeri yang jumlahnya tidak sebanding dengan permintaan beras yang meningkat di tiap tahunnya.</p> <p>Pihak yang dirugikan yaitu produsen-produsen dalam negeri, karena mereka dirugikan oleh harga beras impor yang memiliki harga di bawah harga beras dalam negeri yang tentunya akan berdampak pada tingkat minat konsumen dalam membeli beras dalam negeri. Hal ini tentu akan sangat merugikan produsen dalam negeri jika beras impor terus menerus membanjiri pasaran beras di Indonesia.</p>
5.	Apakah kebijakan ini cukup tepat untuk dilakukan atau diterapkan ?			
6.	Pihak apa sajakah yang dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan impor beras tersebut ?			

7.	Lalu, apakah kebijakan ini benar-benar memihak kepada masyarakat atau justru membuat masyarakat menjadi semakin memburuk setelah adanya kebijakan tersebut ?		Jumlah beras impor yang melebihi dari yang dibutuhkan. Sebenarnya pelaksanaan-pelaksanaan yang sudah bagus, namun hanya saja jumlah beras lebih besar daripada impor yang akan menjadi <i>over limited</i> . Masyarakat yang cenderung memilih beras yang murah dengan kualitas yang bagus daripada memilih beras yang harganya lebih mahal.	Masyarakat yang lebih menyukai beras yang terjangkau harganya ketimbang beras dalam negeri ini yang mengakitnya petani dalam negeri harus bersaing dengan beras impor yang kualitasnya baik agar masyarakat mau berpindah memilih beras yang dihasilkan oleh petani sendiri.
8.	Adakah dampak-dampak dari adanya kebijakan impor beras tersebut ? Seperti apa ?		Dampak-dampaknya seperti konsumsi yang di impor sesuai dengan kebutuhan jadi tidak melebihi apa yang telah dihasilkan di dalam negeri, kemudian impor sudah <i>over extimed</i> atau berlebihan.	Impor beras yang semula hanya untuk menutupi kekurangan pasokan dalam negeri yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, sehingga pemerintah mengimpor beras dari negara yang mengalami <i>surplus</i> beras yaitu Vietnam dan bahkan dari negara lain penghasil beras. Hal ini menyebabkan dampak yaitu <i>over extimed</i> .

## **Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana implementasi kebijakan impor beras di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ?
2. Apakah hasil dari kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ?
3. Apa sajakan kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. Apakah kebijakan impor beras tersebut sesuai dengan kebutuhan pangan di Indonesia saat ini ?
5. Apakah kebijakan ini cukup tepat untuk dilakukan atau diterapkan ?
6. Pihak apa sajakan yang dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan impor beras tersebut ?
7. Lalu, apakah kebijakan ini benar-benar memihak kepada masyarakat atau justru membuat masyarakat menjadi semakin memburuk setelah adanya kebijakan tersebut ?
8. Adakah dampak-dampak dari adanya kebijakan impor beras tersebut ? Seperti apa ?